



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200, Pasal 205, Pasal 206 ayat (1), dan Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan hasil Pemilihan Umum secara nasional Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan, mengumumkan dan mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2014;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 92/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah

Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 93/Kpts/KPU/TAHUN 2013 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 126/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 143/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;

- Memerhatikan:
1. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi;
  2. Berita Acara Nomor: 60/BA/V/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Penetapan Partai Politik yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.
- PERTAMA: Menetapkan Rekapitulasi dan Hasil Perolehan Suara Sah setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap daerah pemilihan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 yang dituangkan dalam Model E-1 DPR dan Lampiran I Model E-1 DPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Menetapkan Rekapitulasi dan Hasil Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap daerah pemilihan/provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 yang dituangkan dalam Model E-1 DPD menjadi sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA: Menetapkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, pada 259 (dua ratus lima puluh sembilan) daerah pemilihan, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- KEEMPAT: Menetapkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh pada 2.102 (dua ribu seratus dua) daerah pemilihan, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah



REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL  
DALAM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

MODEL E-1 DPR  
Halaman 1

No Urut	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA SAH														
		1. Partai Nasdem	2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4. PDI PERJUANGAN	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	6. PARTAI GERINDRA	7. PARTAI DEMOKRAT	8. PARTAI AMANAT NASIONAL	9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	14. PARTAI BULAN BINTANG	15. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	JUMLAH SUARA SAH DAPIL		
1	ACEH I	151.121	92.905	105.868	35.419	140.954	184.538	209.598	151.996	76.785	43.414	39.988	21.767	1.254.353		
2	ACEH II	120.453	44.751	73.940	110.281	91.546	181.847	142.411	89.200	123.946	44.768	27.518	11.212	1.061.873		
3	SUMATERA UTARA I	103.289	73.293	206.247	363.024	265.125	207.398	201.404	146.803	113.622	140.224	42.961	44.237	1.907.627		
4	SUMATERA UTARA II	193.191	121.679	114.424	294.918	271.787	396.545	258.731	204.956	92.088	194.856	47.437	31.205	2.221.817		
5	SUMATERA UTARA III	115.968	60.086	120.894	298.486	467.586	212.699	268.564	148.913	109.234	130.059	39.302	23.124	1.994.915		
6	SUMATERA BARAT I	136.060	40.408	111.750	103.069	251.511	153.689	143.703	150.297	114.123	84.626	37.304	18.180	1.344.720		
7	SUMATERA BARAT II	78.433	47.962	94.010	80.996	151.738	194.591	158.528	76.351	92.173	51.522	28.389	5.926	1.060.619		
8	RIAU I	102.473	115.444	122.611	241.648	232.278	145.252	140.856	193.454	90.671	60.949	37.870	14.350	1.497.856		
9	RIAU II	63.381	101.398	67.392	132.839	312.708	114.822	120.348	73.276	96.530	51.757	24.399	12.978	1.171.828		
10	JAMBI	98.336	105.551	70.303	274.143	288.724	193.970	235.471	179.438	104.628	85.439	39.203	16.752	1.691.958		
11	SUMATERA SELATAN I	101.481	93.615	107.319	292.999	382.985	229.436	160.683	163.175	82.937	103.787	36.704	20.714	1.775.835		
12	SUMATERA SELATAN II	175.923	185.673	135.197	399.848	277.947	275.950	235.682	170.275	85.825	112.766	87.432	24.506	2.167.024		
13	BENGKULU	130.759	81.522	75.826	119.296	92.612	108.507	74.443	92.680	61.856	49.668	17.663	18.923	923.755		
14	LAMPUNG I	107.848	136.637	170.327	363.555	182.202	208.796	218.348	276.424	71.490	152.407	26.139	13.414	1.927.587		
15	LAMPUNG II	196.574	197.130	182.644	347.791	282.116	329.847	252.444	145.040	76.615	79.789	19.343	22.580	2.131.913		
16	BANGKA BELITUNG	47.763	22.662	41.897	137.085	71.063	37.250	62.718	46.306	52.370	31.748	24.519	8.066	583.447		
17	KEPULAUAN RIAU	95.848	28.976	66.095	132.412	95.354	91.942	81.150	119.044	37.760	11.913	11.106	822.336	1.298.430		
18	DKI JAKARTA I	43.097	75.423	138.029	301.010	116.472	158.604	115.382	86.236	171.269	68.217	15.733	8.958	1.298.430		
19	DKI JAKARTA II	69.286	108.440	261.477	493.938	174.908	250.800	144.339	63.158	153.147	101.191	19.005	10.444	1.850.133		
20	DKI JAKARTA III	119.147	55.318	138.399	615.225	143.048	201.376	92.272	62.146	173.436	117.344	16.820	7.940	1.742.471		
21	JAWA BARAT I	96.979	56.098	165.442	329.095	149.982	220.728	115.236	63.390	90.496	99.538	34.090	9.644	1.430.718		
22	JAWA BARAT II	118.981	164.779	188.925	458.909	431.915	274.411	309.279	136.765	120.748	143.900	58.854	15.473	2.422.939		
23	JAWA BARAT III	63.780	89.244	157.667	243.176	254.742	133.647	222.686	67.575	100.955	104.716	36.908	10.936	1.486.032		
24	JAWA BARAT IV	58.619	67.854	131.156	189.011	211.831	118.565	99.899	175.742	127.217	80.901	14.392	7.873	1.283.060		
25	JAWA BARAT V	113.490	107.879	148.011	345.307	377.588	319.846	164.422	115.933	249.578	109.489	34.918	7.311	2.093.772		
26	JAWA BARAT VI	50.203	78.897	233.738	433.127	209.513	283.126	121.262	126.457	112.758	113.633	24.932	11.724	1.799.370		
27	JAWA BARAT VII	125.620	162.383	234.477	608.658	539.911	373.811	206.295	154.557	160.208	135.598	48.441	12.477	2.762.436		
28	JAWA BARAT VIII	109.818	241.657	131.850	413.101	445.760	214.523	120.914	53.113	65.018	128.972	21.356	6.920	1.953.002		
29	JAWA BARAT IX	114.300	162.079	156.451	512.530	334.967	175.017	202.920	90.683	132.952	90.137	23.533	14.905	2.019.474		
30	JAWA BARAT X	78.251	104.694	168.738	313.984	214.519	89.400	137.215	184.161	129.544	49.996	17.721	7.346	1.495.569		
31	JAWA BARAT XI	105.687	337.170	187.093	303.513	369.901	175.688	230.886	223.104	342.330	100.406	53.338	15.139	2.444.255		
32	JAWA TENGAH I	152.217	195.225	128.963	516.122	169.515	206.577	157.245	136.583	118.254	63.885	7.712	6.806	1.859.104		
33	JAWA TENGAH II	99.612	230.157	73.075	175.036	448.420	177.111	55.631	81.132	164.286	62.914	9.307	3.139	1.579.820		
34	JAWA TENGAH III	130.060	280.384	123.354	392.472	301.851	285.557	202.818	92.244	139.679	92.740	13.961	16.812	2.071.932		
35	JAWA TENGAH IV	47.186	103.911	160.546	417.714	235.865	168.597	110.433	123.963	55.950	92.114	6.932	4.923	1.528.134		
36	JAWA TENGAH V	120.090	137.727	120.918	861.673	269.446	153.378	81.667	145.363	52.877	55.214	9.070	4.405	2.014.828		
37	JAWA TENGAH VI	146.264	358.790	91.774	454.259	203.508	131.447	131.447	162.515	137.499	101.462	11.385	8.002	2.014.315		
38	JAWA TENGAH VII	143.183	164.535	102.966	300.978	144.563	297.057	97.465	110.604	130.237	62.151	18.055	3.781	1.575.575		
39	JAWA TENGAH VIII	47.985	216.461	81.773	487.813	296.890	229.642	118.282	134.829	97.771	49.274	9.018	4.392	1.774.130		
40	JAWA TENGAH IX	62.146	282.131	109.527	376.245	234.622	162.077	84.622	103.357	117.118	93.511	6.489	4.130	1.635.975		
41	JAWA TENGAH X	86.383	336.121	83.612	313.293	192.602	136.674	81.109	117.612	138.102	57.487	7.203	3.448	1.553.646		
42	DI YOGYAKARTA	107.433	129.943	147.875	570.531	200.474	244.144	146.688	355.787	94.435	42.782	14.162	5.199	2.059.453		



1. Husni Kamil Manik Ketua TTD
2. Ida Budhiati, SH., MH. Anggota TTD
3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota TTD
4. Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. Anggota TTD
5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si. Anggota TTD
6. Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota TTD
7. Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota TTD



REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL  
DALAM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

No Urut	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA SAH											15. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	JUMLAH SUARA SAH DAPIL
		1. Partai Nasdem	2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4. PDI PERJUANGAN	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	6. PARTAI GERINDRA	7. PARTAI DEMOKRAT	8. PARTAI AMANAT NASIONAL	9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	14. PARTAI BULAN BINTANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	JAWA TIMUR I	67.451	385.629	102.720	497.347	133.644	250.459	186.270	196.645	87.293	87.069	15.573	6.803	2.016.903
44	JAWA TIMUR II	296.136	299.534	77.448	150.395	220.105	184.263	121.303	35.305	104.711	57.632	7.706	7.148	1.561.686
45	JAWA TIMUR III	91.838	434.967	80.360	254.532	192.166	143.379	129.880	39.671	138.113	54.276	7.186	5.520	1.571.888
46	JAWA TIMUR IV	114.551	338.523	92.281	248.968	131.667	285.750	131.743	86.699	72.720	46.578	23.066	7.222	1.627.760
47	JAWA TIMUR V	122.385	266.530	68.050	444.112	260.100	199.899	104.411	86.699	54.572	77.777	12.588	6.465	1.703.588
48	JAWA TIMUR VI	87.000	308.253	81.017	666.338	192.811	229.513	171.222	246.975	77.248	81.857	21.143	7.130	2.170.507
49	JAWA TIMUR VII	117.362	232.005	140.147	347.140	224.850	178.963	428.434	110.770	88.026	83.324	16.922	6.821	1.974.764
50	JAWA TIMUR VIII	163.065	378.531	118.341	420.196	236.372	284.944	205.557	133.289	106.248	131.355	21.496	11.832	2.211.226
51	JAWA TIMUR IX	69.512	275.141	47.047	160.182	132.904	149.778	205.387	92.422	59.656	38.621	8.625	8.542	1.247.817
52	JAWA TIMUR X	74.793	251.178	35.505	217.923	223.961	150.926	87.310	103.575	103.518	21.475	6.938	7.666	1.284.768
53	JAWA TIMUR XI	291.378	363.611	44.195	173.812	193.641	298.696	376.536	78.863	413.230	355.259	25.441	6.751	2.621.413
54	BANTEN I	103.015	82.575	85.277	174.580	192.641	141.161	138.046	37.898	138.003	50.402	24.598	4.920	1.173.116
55	BANTEN II	73.425	73.477	91.247	117.960	148.768	169.466	76.324	130.641	105.439	58.676	25.381	14.025	1.084.829
56	BANTEN III	140.425	194.094	215.323	522.977	309.083	330.883	288.584	180.089	167.518	165.214	39.231	30.493	2.583.914
57	BALI	60.969	39.281	37.090	872.885	329.620	219.521	311.246	37.247	15.047	77.247	3.731	33.985	2.024.250
58	NUSA TENGGARA BARAT	154.981	182.320	253.870	189.569	333.282	263.621	318.713	196.074	172.421	222.410	83.768	41.460	2.412.489
59	NUSA TENGGARA TIMUR I	84.815	77.683	43.761	181.859	218.845	114.910	115.315	147.298	21.575	46.151	19.141	27.078	1.098.431
60	NUSA TENGGARA TIMUR II	186.149	53.242	18.238	221.962	233.351	119.019	200.695	58.607	8.700	102.104	21.768	32.895	1.256.730
61	KALIMANTAN BARAT	168.741	117.937	102.146	817.770	348.986	236.281	196.890	196.212	136.564	86.741	30.813	39.181	2.478.262
62	KALIMANTAN TENGAH	85.960	67.753	49.522	350.701	141.095	120.019	75.467	84.259	79.756	50.941	15.431	18.640	1.139.544
63	KALIMANTAN SELATAN I	48.564	84.713	101.440	61.799	308.267	90.359	58.248	37.725	114.920	62.794	18.656	9.323	996.808
64	KALIMANTAN SELATAN II	53.867	118.180	50.668	130.565	178.047	82.039	42.823	35.343	100.162	32.316	12.078	5.035	841.123
65	KALIMANTAN TIMUR	117.117	84.147	144.705	312.574	362.238	222.472	159.977	96.998	131.381	98.587	40.586	27.657	1.798.439
66	SULAWESI UTARA	69.628	23.930	41.434	449.675	217.265	146.007	163.775	150.989	31.601	91.875	8.652	15.115	1.409.946
67	SULAWESI TENGAH	171.289	71.783	83.990	143.106	274.610	182.217	174.006	97.049	52.099	123.646	26.087	24.866	1.424.748
68	SULAWESI SELATAN I	99.135	46.444	147.115	103.141	205.288	184.859	199.652	163.965	123.091	113.526	15.364	53.016	1.454.596
69	SULAWESI SELATAN II	113.286	70.266	107.095	112.263	373.964	271.072	180.747	135.876	137.320	90.172	22.683	9.171	1.623.915
70	SULAWESI SELATAN III	104.000	52.120	84.756	98.111	305.589	204.331	109.506	127.373	127.373	83.026	19.613	30.190	1.325.654
71	SULAWESI TENGGARA	90.363	58.772	60.177	97.056	178.294	123.957	126.764	271.231	99.140	40.315	26.699	7.965	1.180.733
72	GORONTALO	20.930	13.285	26.499	40.606	310.790	49.342	47.662	41.222	31.114	36.640	16.172	2.392	636.654
73	SULAWESI BARAT	33.587	50.166	21.261	41.678	123.048	98.461	119.801	93.977	35.619	22.253	6.292	13.823	659.966
74	MALUKU	107.443	113.294	49.528	192.731	162.549	130.794	66.517	26.473	27.702	27.120	8.646	14.541	927.338
75	MALUKU UTARA	65.357	22.655	71.757	122.504	85.413	45.594	50.587	77.099	20.000	23.345	30.180	13.154	627.645
76	PAPUA	298.176	251.772	159.653	491.591	257.767	303.396	700.150	193.145	105.766	135.257	16.265	50.342	2.963.280
77	PAPUA BARAT	27.401	18.174	13.961	89.334	160.242	30.175	143.869	45.242	11.325	17.430	5.812	10.760	573.725
	JUMLAH	8.402.812	11.298.957	8.480.204	23.681.471	18.432.312	14.760.371	12.728.913	9.481.621	8.157.488	6.579.498	1.825.750	1.143.094	124.972.491

JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK : 124.972.491

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- |         |       |     |
|---------|-------|-----|
| Ketua   | _____ | TTD |
| Anggota | _____ | TTD |
| Anggota | _____ | TTD |
| Anggota | _____ | TTD |
| Anggota | _____ | TTD |
| Anggota | _____ | TTD |

- Husni Kamil Manik
- Ida Budhiati, SH., MH.
- Sigit Pamungkas, S.IP., MA.
- Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA
- Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si.
- Drs. Hadar Nafis Gumay
- Juri Ardiantoro, M.Si.

Jakarta, 09 Mei 2014

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah